

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas atau tindakan kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap negara. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyikapi tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus menangani dengan serius permasalahan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Pelaku tindak kejahatan harus mendapatkan sanksi dan hukuman yang sepadan atas perbuatannya yang melanggar hukum agar menimbulkan efek jera sehingga angka kriminalitas dapat menurun. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan bisa berupa pemidanaan yang diputuskan oleh peradilan ataupun sanksi yang diberikan oleh masyarakat yaitu sanksi sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah kejahatan di Indonesia mencapai 239.481 kasus. Jumlah kejadian kejahatan di Indonesia pada tahun 2021 menurun dari tahun 2020, walaupun jumlah tersebut menurun namun jumlah tersebut tetap masih tergolong tinggi dengan berbagai jenis kejahatan yang terjadi. Provinsi Jawa Barat menjadi urutan ke 9 (Sembilan) terbanyak jumlah kejahatannya. Jumlah kejadian kejahatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 7.502 kasus. Hal ini menjadi perhatian untuk pemerintah provinsi Jawa Barat khususnya Kementerian Hukum dan HAM wilayah Jawa Barat dalam mengurangi tindak kejahatan yang terjadi dan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pembinaan kepada pelaku

tindak kejahatan.

Pelaku tindak kejahatan yang sedang menunggu putusan pengadilan disebut tahanan dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sementara pelaku tindak kejahatan yang sudah divonis dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan disebut narapidana dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rumah tahanan negara sejatinya hanya tempat untuk tahanan, namun mengingat lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat melaksanakan pembinaan narapidana mengalami kondisi *over capacity* sehingga rumah tahanan negara juga dijadikan tempat untuk pembinaan narapidana. Rumah tahanan negara saat ini memiliki 2 warga binaan pemasyarakatan yaitu tahanan dan narapidana sehingga rutan memiliki dua fungsi yaitu merawat tahanan dan membina narapidana. Pembinaan narapidana dalam Rumah tahanan negara sama dengan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan salah satu lembaga atau institusi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM per tanggal 27 Juli 2023 memiliki 1332 warga binaan pemasyarakatan dengan 801 berstatus tahanan dan 531 berstatus narapidana.

Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam rumah tahanan negara akan menjalankan kehidupannya selama masa penahanan dan masa pembinaan. Pembinaan yang dilakukan rumah tahanan negara sesuai dengan sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, tujuan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan akan bermanfaat baik dan tujuan pemasyarakatan akan tercapai selama terjalinnya keselarasan dan keseimbangan antara petugas, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat.

Warga binaan pemasyarakatan yang hidup dalam rumah tahanan negara berasal dari daerah dan kalangan yang berbeda-beda serta memiliki latar belakang yang berbeda baik ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan jabatan. Masa pemidanaan atau penahanan tiap-tiap warga binaan pun berbeda sesuai dengan kasus yang dihadapi dan sesuai dengan vonis yang dijatuhkan pada pengadilan. Karakteristik penghuni yang beragam seharusnya dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling mengerti dan memahami satu sama lain.

Seseorang yang berada dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan akan berubah kehidupan dan statusnya yang semula warga biasa menjadi warga binaan pemasyarakatan yaitu tahanan atau narapidana. Warga binaan pemasyarakatan akan mengalami perubahan dalam dirinya dan menjadi terbatas hak-haknya. Warga binaan pemasyarakatan perilakunya akan terbatas karena harus mengikuti peraturan dan norma yang berlaku di dalam rutan. Ruang

gerak kehidupannya dibatasi dan terisolasi dari kehidupan masyarakat luar. Warga binaan pemasyarakatan hilang kebebasannya untuk bertemu siapapun yang diinginkan.

Warga binaan pemasyarakatan ketika mereka harus menjadi penghuni rutan, terkadang mengalami berbagai gangguan dan penurunan kebahagiaan, kesejahteraan, serta kesenangan. Menurut Phili Mofah, warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, tidak bisa menyelesaikan permasalahan, mengalami stress, dan depresi. Hal ini menyebabkan warga binaan pemasyarakatan menunjukkan ekspresi kemarahan, depresi dan frustrasi, serta menurunnya tingkat kebahagiaan dan kepuasan mereka. Padahal kesejahteraan psikologis merupakan sebuah parameter potensial untuk mengukur secara keseluruhan dan kehidupan yang baik dari seseorang (Seligman & Csikzentmihalyi, 2000).

Kesejahteraan psikologis dapat menjadikan gambaran mengenai level tertinggi dari fungsi individu sebagai manusia dan apa yang diidam-idamkannya sebagai makhluk yang memiliki tujuan dan akan berjuang untuk tujuan hidupnya (Snyder dan Lopez, 2002). Individu yang merasa sejahtera akan mampu memperluas persepsinya di masa mendatang dan mampu membentuk dirinya sendiri (Fredrickson, dalam Eid & Larsen, 2008). Adanya perasaan sejahtera dalam diri akan membuat individu untuk mampu bertahan serta memaknai kesulitan yang dialami sebagai pengalaman hidupnya.

Kesejahteraan psikologis adalah kemampuan individu untuk dapat memenuhi dimensi-dimensi kesejahteraan psikologis yaitu penerimaan diri,

hubungan yang positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi (Ryff 1989; Ryff & Keyes, 1995). Kesejahteraan psikologis sebagai istilah subjektif yang berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda pula, kesejahteraan psikologis disebut juga dengan kesehatan mental yang berarti suatu keadaan yang relatif dimana pikiran orang yang sehat mampu mengatasi dan menyesuaikan diri dengan tekanan hidup sehari-hari dengan cara yang dapat diterima (Wells, 2010).

Huppert (2009) mengatakan bahwa “kesejahteraan psikologis mewujudkan kehidupan yang berjalan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan yang baik dan berfungsi secara efektif. Orang-orang dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi memiliki perasaan senang, mendapatkan dukungan, dan puas akan kehidupannya”.

Terdapat beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan tingkat kesejahteraan psikologis para warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam rumah tahanan. Faktor-faktor tersebut mencakup pembatasan dalam menyampaikan pendapat atau keinginan mereka, rendahnya penerimaan diri akibat perubahan status sosial, merasa kehilangan arti dan tujuan hidup, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas tentunya memicu timbulnya stres pada warga binaan. Kehidupan dalam rumah tahanan memang tidak mudah dan terdapat berbagai permasalahan. Maka dengan kondisi berbagai permasalahan yang dihadapi memungkinkan seorang warga binaan mengalami tekanan batin, mengembangkan perasaan negatif, dan cara

berfikirnya menjadi negatif. Semakin lama warga binaan menghadapi berbagai permasalahan akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan psikologisnya dan timbul berbagai permasalahan yang dialami dirinya.

Kesejahteraan psikologis warga binaan yang baik akan mempengaruhi perilaku warga binaan tersebut, warga binaan akan bersikap baik ketika memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi. Oleh karena itu sangatlah penting warga binaan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik agar mampu menjalankan pembinaan pola pembinaan yang bertujuan agar mereka dapat kembali berfungsi sebagai masyarakat pada umumnya, dan mampu menghadapi permasalahan yang mereka alami.

Berdasarkan penjabaran di atas tentang kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan, maka hal tersebut yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kesejahteraan Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kesejahteraan Psikologis Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung”. Selanjutnya rumusan masalah penelitian tersebut dirinci pada sub-sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana penerimaan diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?
3. Bagaimana hubungan positif dengan orang lain warga binaan pemasyarakatan

di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?

4. Bagaimana kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?
5. Bagaimana penguasaan lingkungan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?
6. Bagaimana tujuan hidup warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?
7. Bagaimana pertumbuhan pribadi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan menjawab sub-sub masalah yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui gambaran empiris mengenai:

1. Karakteristik responden.
2. Penerimaan diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
3. Hubungan positif dengan orang lain warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
4. Kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
5. Penguasaan lingkungan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

6. Tujuan hidup warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
7. Pertumbuhan pribadi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya informasi serta memberikan gambaran secara empiris terkait konsep kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam rumah tahanan negara dan dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pekerjaan sosial koreksional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam penanganan masalah kesejahteraan psikologis warga binaan pemasyarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan panduan yang telah disediakan. Adapun yang menjadi sistematika penulisan yakni:

- BAB I** PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, konsep dan teori yang relevan meliputi tinjauan konseptual tentang

kesejahteraan psikologis, dan tinjauan konseptual yang relevan dengan praktik pekerjaan sosial.

- BAB III** **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.
- BAB V** **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.
- BAB VI** **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan hasil penelitian dan saran terkait dengan implementasi program.